

DAFTAR PUSTAKA

- Augustine, Z. D. (2018). *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Puskesmas Torjun Atas Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 23*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Azwar, S. (2013), *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Casavera. (2008), *Seri Perpajakan Indonesia – 5*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Diana, S. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan cetakan Pertama* . Bandung: Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Peraturan Dirjen Pajak PER-57/Pj/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak PER 31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Sistem Perpajakan. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PPh Pasal 22. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-22>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 07/PJ/2020 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 12/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembenahan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak Instansi Pemerintah/Bendahara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Halim, Abdul. (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Kasim, C. V., & Ilat, V. (2016). *PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 4(1) 555. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11713>
- Kementerian Keuangan. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara

Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan di Bidang Lain. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. 2010. Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-05/PJ.09/2010 Tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi Instansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kusumawati, L. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Boyolali)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Maulida, D. I. (2018). *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar Atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan Pemotongan PPh Pasal 23*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Mu'am, A. (2016). *KONSEP PEMBENTUKAN – POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)*.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan* : Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Nurmantu, S.(2005), *Pengantar Perpajakan: edisi keempat*. Jakarta: Granit.

- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2005), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara .Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rianto, E. S. (2020). *Pajak Bentuk Nyata Gotong Royong*. Diambil kembali dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/opini/329789/pajak-bentuk-nyata-gotong-royong.html>
- Rianto, E. S. (2020). *Pajak Bentuk Nyata Gotong Royong*. Diambil kembali dari Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/opini/329789/pajak-bentuknyata-gotong-royong.html>
- Riduan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, B. (2016). *Buku praktik pemotongan dan pemungutan PPH : PPH pasal 21, 22,23,24,25,26, 4 ayat 4 (2) dan (15)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Subagyo, P. J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* . Semarang: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahida, A. P. (2019). *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Bendahara Badan Narkotika Nasional Kota Kediri*. Tangerang Selatan: Politeknik Keaungan Negara STAN.